

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kabupaten Demak

Halaman 6

Korupsi Potensial Terjadi di Pengadaan Barang dan Jasa Serta Pengangguran

DEMAK - Terdapat tiga kegiatan wilayah di pemerintahan rawan terjadi korupsi. Ketiga kegiatan itu adalah pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan perijinan satu pintu.

Pada Sosialisasi Penyusunan APBD Secara Elektronik Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama DPRD dan Pemkab Demak, Koordinator Wilayah V Jateng DIY Bidang Pencegahan Kunto Ariawan menyampaikan, setidaknya ada delapan kegiatan di pemerintahan berpotensi terjadi tindak korupsi. Seperti penggelontoran dana desa, hingga jual beli jabatan. Namun tiga di antaranya paling berpotensi sesuai urutan adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, sisanya pengelolaan anggaran dan pelayanan perizinan satu pintu.

"Pada 2018 tercatat 90 anggota DPR tersangkut perkara korupsi. Rata-rata adalah perkara perencanaan anggaran," ujarnya, Senin (15/7).

Namun sejak ada sosialisasi pencegahan korupsi, terantau ada progres renaksi pencegahan korupsi cukup signifikan. Di Indonesia naik 24 persen, Jateng 34 persen, sementara Demak 36 persen.

"Di sini fungsi DPRD sangat dibutuhkan guna membantu pencegahan. Yakni fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, ada empat upaya perencanaan dan penganggaran APBD agar terhindar dari tindak korupsi. Yakni tersedianya aplikasi perencanaan, terdokumentasinya musrenbang, dokumentasi RPJMD, serta digunakannya standar harga.

Sedangkan kunci keberhasilan pencegahan korupsi adalah adanya komitmen pimpinan, profesionalisme SDM ASN, integritas sistem, pengawasan konstruktif, reward dan punishment, serta partisipasi publik dan stake

holder.

Sementara itu Ketua DPRD Demak H Nurul Muttaqin menyampaikan, sistem e-planning dan e-budgeting telah diterapkan di Kabupaten Demak sejak 2018. Dimaksudkan tentunya agar pembangunan benar-benar terarah sesuai perencanaan.

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri pula oleh para kepala OPD di lingkup Pemkab Demak tersebut sudah menjadi program bersama KPK, DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih berintegritas.

Hal sama disampaikan Bupati HM Natsir, yang hadir bersama Wabup H Joko Sultanto dan Sekda dr H Singgih Setyono. Bupati berharap selepasnya kegiatan sosialisasi ada perencanaan dan penyeselarasan antara eksekutif dan legislatif sehingga tercipta persepsi yang sama. Serta output berupa berkurangnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aplikasi e-planning dan e-budgeting, yang sudah digunakan sejak 2018, dimaksudkan memudahkan

semua pihak, termasuk masyarakat dan stake holder dalam pemantauan. Sebab ketersediaan info dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan

daerah. Bottom up dan ditindaklanjuti top down. Sehingga terselenggara pemerintah daerah bersih dan minimnya angka tindak korupsi.

"Kami berharap terjalin

koordinasi yang lebih baik sehingga program pembangunan tepat waktu dan tertib administrasi. Sehingga opini WTP dari BPK dapat dipertahankan," tandas bupati. ■ ssi